



GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 24 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT ACEH PEMERINTAH ACEH TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penetapan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Aceh Pemerintah Aceh Tahun 2024;

Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Aceh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1774);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
14. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Aceh Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 12) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Aceh Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 102);
15. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh Tahun 2012-2032 (Lembaran Aceh Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 46, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 9);
16. Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh Tahun 2013-2023 (Lembaran Aceh Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 62);
17. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 22 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Otonomi Khusus (Berita Daerah Aceh Tahun 2019 Nomor 23);
18. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Aceh (RPA) Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Aceh Tahun 2019 Nomor 23);
19. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 17 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Aceh Tahun 2024 (Berita Daerah Aceh Tahun 2023 Nomor 17);

MEMUTUSKAN : / 3

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT ACEH PEMERINTAH ACEH TAHUN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh Gubernur.
2. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan Perangkat Aceh.
3. Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh.
4. Satuan Kerja Perangkat Aceh yang selanjutnya disebut SKPA adalah organisasi perangkat daerah pada Pemerintah Aceh; dan
5. Rencana Kerja yang selanjutnya disebut dengan Renja adalah dokumen perencanaan Perangkat Aceh untuk periode 1 (satu) Tahun yang memuat kebijakan, Program dan Kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan.

Pasal 2

- (1) Menetapkan Renja SKPA Pemerintah Aceh Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) Renja SKPA Pemerintah Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Dokumen Perencanaan SKPA Pemerintah Aceh untuk periode 1 (satu) tahun yaitu Tahun 2024 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2024 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

Pasal 3

- (1) Penetapan Renja SKPA Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) Renja SKPA Pemerintah Aceh Tahun 2024 digunakan untuk :
 - a. dasar penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah; dan
 - b. pedoman Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPA Tahun 2024.

Pasal 4..../4

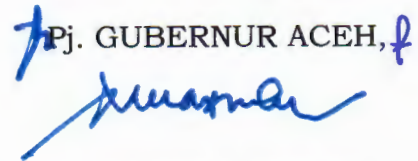


Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

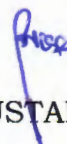
Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 31 Juli 2023
13 Muharram 1445

 Pj. GUBERNUR ACEH, f

ACHMAD MARZUKI

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal, 31 Juli 2023
13 Muharram 1445

 SEKRETARIS DAERAH ACEH, f


BUSTAMI

BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2023 NOMOR 24

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 24 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA
SATUAN KERJA PERANGKAT ACEH
PEMERINTAH ACEH TAHUN 2024.-----

No.	Nomor	SKPA	Keterangan
1	2	3	4
1	01/Renja-Disdik/2023	Dinas Pendidikan Aceh	
2	02/Renja-Dinkes/2023	Dinas Kesehatan Aceh	
3	03/Renja-RSUZA/2023	BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Zainal Abidin	
4	04/Renja-RSJ/2023	BLUD Rumah Sakit Jiwa	
5	05/Renja-RSIA/2023	BLUD Rumah Sakit Ibu dan Anak	
6	06/Renja/PUPR/2023	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh	
7	07/Renja-Pengairan/2023	Dinas Pengairan Aceh	
8	08/Renja-Perkim/2023	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh	
9	09/Renja-Satpol.PP.WH/2023	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh	
10	10/Renja-BPBA/2023	Badan Penanggulangan Bencana Aceh	
11	11/Renja-Dinsos/2023	Dinas Sosial Aceh	
12	12/Renja-Naker/2023	Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh	
13	13/Renja-DP3A/2023	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh	
14	14/Renja-Pangan/2023	Dinas Pangan Aceh	
15	15/Renja-Tanah/2023	Dinas Pertanahan Aceh	
16	16/Renja-DRKA/2023	Dinas Registrasi Kependudukan Aceh	
17	17/Renja-DPMGA/2023	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh	
18	18/Renja-Dishub/2023	Dinas Perhubungan Aceh	
19	19/Renja-Kominsa/2023	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh	
20	20/Renja-Kop.UKM/2023	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Aceh	
21	21/Renja-DPMP2TA/2023	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Aceh	
22	22/Renja-Dispora/2023	Dinas Pemuda dan Olahraga Aceh	
23	23/Renja-Disbudpar/2023	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh	
24	24/Renja-Arpus/2023	Dinas Perpustakaan dan Arsip Aceh	
25	25/Renja-DPDA/2023	Dinas Pendidikan Dayah Aceh	
26	26/Renja-MPA/2023	Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh	
27	27/Renja-KKW/2023	Keurukon Katibul Wali Aceh	
28	28/Renja-MAA/2023	Sekretariat Majelis Adat Aceh	
29	29/Renja-Dinsyar/2023	Dinas Syariat Islam Aceh	
30	30/Renja-MPU/2023	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh	
31	31/Renja-BMA/2023	Sekretariat Baitul Mal Aceh	
32	32/Renja-BRA/2023	Sekretariat Badan Reintegrasi Aceh	
33	33/Renja-DKP/2023	Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh	
34	34/Renja-Tanbun/2023	Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh	
35	35/Renja-Disnak/2023	Dinas Peternakan Aceh	

No.	Nomor	SKPA	Keterangan
1	2	3	4
36	36/Renja-DLHK/2023	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh	
37	37/Renja-ESDM/2023	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh	
38	38/Renja-Indag/2023	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh	
39	39/Renja-Inspektorat/2023	Inspektorat Aceh	
40	40/Renja-BAPPEDA/2023	Badan Perencanaan dan Pembangunan Aceh	
41	41/Renja-BPKA/2023	Badan Pengelolaan Keuangan Aceh	
42	42/Renja-BKA/2023	Badan Kepegawaian Aceh	
43	43/Renja-BPSDM/2023	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Aparatur Aceh	
44	44/Renja-BPPA/2023	Badan Penghubung Pemerintah Aceh	
45	45/Renja-Ro.Umum/2023	Biro Umum	
46	46/Renja-Ro.Pemotda/2023	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	
47	47/Renja-Romi/2023	Biro Perekonomian	
48	48/Renja-Ro.isra/2023	Biro Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat	
49	49/Renja-Ro. Organ/2023	Biro Organisasi	
50	50/Renja-Ro.Hukum/2023	Biro Hukum	
51	51/Renja-Ro. Adpem/2023	Biro Administrasi Pembangunan	
52	52/Renja-Ro. Adpim/2023	Biro Administrasi Pimpinan	
53	53/Renja-Ro.PBJ/2023	Biro Pengadaan Barang/Jasa	
54	54/Renja-Sek.DPRA/2023	Sekretariat DPR Aceh	
55	55/Renja-Kesbangpol/2023	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh	

7. GUBERNUR ACEH, f


ACHMAD MARZUKI